



# Desentralisasi sebagai Instrumen Diplomasi Sulawesi Barat: Peluang dan Tantangan Kerjasama Internasional di Kawasan Asia Tenggara

Rezky Ramadhan Antuli<sup>1\*</sup>, Danar Hafidz Adi Wardhana<sup>2</sup>, Asma Amin<sup>3</sup>, Dwi Rianisa Mausili<sup>4</sup>, Dewi Nuraliah<sup>5</sup>

Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received September 18, 2025

Revised October 02, 2025

Accepted October 30, 2025

Available online October 31, 2025

### Kata Kunci :

Desentralisasi, Peluang, Tantangan, Kerjasama Internasional, Sulawesi Barat

### Keywords:

*Decentralization, Opportunities, Challenges, International Cooperation, West Sulawesi*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2025 by Rezky Ramadhan Antuli, Danar Hafidz Adi Wardhana, Asma Amin, Dwi Rianisa Mausili, Dewi Nuraliah. Published by CV. Rifainstitut

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji desentralisasi sebagai instrumen strategis dalam diplomasi daerah, dengan menyoroti peluang dan tantangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam kerjasama internasional di kawasan Asia Tenggara. Provinsi ini memiliki potensi unggulan pada sektor perkebunan, kelautan, dan perikanan yang dapat dikembangkan melalui mekanisme paradiplomasi, seperti skema *Sister Province* atau *Sister City*. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengidentifikasi dua fokus utama: peluang yang dapat dimanfaatkan Pemerintah Daerah Sulawesi Barat melalui desentralisasi, serta hambatan dalam implementasinya. Penelitian ini menunjukkan bahwa peluang kerja sama cukup terbuka, terutama dengan Filipina, Singapura, dan Thailand, dalam pengembangan komoditas strategis seperti kopi, kelapa, dan produk perikanan. Namun, tantangan struktural masih menghambat, termasuk keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan yang lemah, infrastruktur ekspor yang belum memadai, serta minimnya jaringan promosi dan hubungan internasional. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian mendalam mengenai pemanfaatan desentralisasi sebagai instrumen diplomasi daerah oleh provinsi dengan kapasitas terbatas, seperti Sulawesi Barat. Kontribusi penelitian ini tidak hanya memperluas diskursus tentang paradiplomasi di Indonesia, tetapi juga menghadirkan model strategis yang menghubungkan peran pemerintah daerah, sektor usaha, dan mitra internasional dalam menguatkan daya saing komoditas lokal serta menegaskan posisi Sulawesi Barat dalam dinamika diplomasi ekonomi kawasan.

## ABSTRACT

*This research examines decentralization as a strategic instrument in regional diplomacy, highlighting the opportunities and challenges for the West Sulawesi Provincial Government in international cooperation in the Southeast Asia region.. This province has superior potential in the plantation, maritime, and fisheries sectors that can be developed through paradiplomacy mechanisms, such as the Sister Province or Sister City scheme. Using a descriptive qualitative approach, this study identifies two main focuses: the opportunities that the West Sulawesi Regional Government can exploit through decentralization, and the obstacles to its implementation. The research indicate that opportunities for cooperation are quite open, especially with the Philippines, Singapore, and Thailand, in the development of strategic commodities such as coffee, coconut, and fishery products. However, structural challenges remain, including limited human resource capacity, weak institutions, inadequate export infrastructure, and a lack of promotional networks and international relations. The novelty of this research lies in its in-depth analysis of the use of decentralization as an instrument of regional diplomacy by a province with limited capacity, such as West Sulawesi. This research contribution not only broadens the discourse on paradiplomacy in Indonesia but also presents a strategic model that connects the roles of local governments, the business sector, and international partners in strengthening the competitiveness of local commodities and affirming West Sulawesi's position in the dynamics of regional economic diplomacy.*

\*Corresponding author

E-mail addresses: [ekyvspain@gmail.com](mailto:ekyvspain@gmail.com) (Rezky Ramadhan Antuli)

## **1. PENDAHULUAN**

Selama dua puluh tahun terakhir, Indonesia telah menerapkan kebijakan desentralisasi sebagai bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan. Kebijakan ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan domestik mereka, termasuk membuka peluang untuk menjalin hubungan dan kerja sama internasional (UU RI No.23, 2014). Dalam konteks globalisasi, kebijakan desentralisasi membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas ekonomi melalui penguatan kerja sama internasional, masuknya investasi asing, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia di tingkat lokal (Lathifah et al., 2024).

Fenomena ini dikenal dengan istilah paradiplomasi, yaitu keterlibatan pemerintah daerah dalam aktivitas diplomasi lintas negara yang sebelumnya menjadi domain eksklusif pemerintah pusat. Paradiplomasi dapat dipahami sebagai suatu bentuk interaksi politik yang dilakukan oleh pemerintah daerah suatu negara dengan entitas subnasional maupun aktor non-pemerintah di negara lain. Aktivitas ini bertujuan untuk memperjuangkan dan mengakomodasi kepentingan masing-masing pihak, yang dapat meliputi aspek ekonomi, politik, sosial-budaya, pendidikan, serta berbagai kepentingan strategis lainnya (Kuznetsov, 2014).

Sulawesi Barat, yang merupakan hasil pemekaran wilayah dan tergolong sebagai daerah otonom baru di Indonesia, dihadapkan pada berbagai tantangan dalam memaksimalkan implementasi desentralisasi sebagai sarana untuk memperluas jaringan dan membangun kemitraan di ranah kerja sama internasional. Kawasan Asia Tenggara, yang terintegrasi melalui kerangka kerja sama regional seperti ASEAN, memberikan peluang strategis bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk memperluas kolaborasi lintas batas dalam berbagai sektor. Melalui inisiatif seperti ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Smart Cities Network (ASCN), daerah-daerah di Indonesia termasuk Sulawesi Barat dapat mengakses platform kerja sama yang mencakup bidang ekonomi, pendidikan, budaya, dan pembangunan berkelanjutan (Asean.Org, 2025).

Paradiplomasi, yang merepresentasikan peran aktif pemerintah daerah dalam ranah hubungan internasional, memberikan peluang bagi wilayah-wilayah di Indonesia termasuk Sulawesi Barat untuk mengoptimalkan potensi lokalnya dalam kerangka kerja sama regional. Dalam lingkup Asia Tenggara, praktik ini tidak sekadar berfungsi sebagai pendukung diplomasi nasional, tetapi juga menjadi strategi penting untuk menguatkan daya saing komoditas unggulan daerah. Partisipasi pemerintah daerah dalam aktivitas diplomasi internasional di sisi lain masih menghadapi berbagai kendala struktural dan operasional. Keterbatasan kapasitas institusional, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas peran diplomatik daerah. Di samping itu, rendahnya pemahaman terhadap prosedur, mekanisme, dan strategi paradiplomasi turut membatasi kemampuan daerah dalam mengoptimalkan peluang kerja sama di tingkat kawasan.

Mengingat kompleksitas dinamika tersebut, kajian mendalam mengenai peran desentralisasi sebagai instrumen strategis dalam diplomasi daerah menjadi sangat krusial. Selain itu, penting untuk menganalisis bagaimana Pemerintah Daerah Sulawesi Barat mampu mengenali serta mengelola berbagai peluang dan kendala dalam membangun kerja sama internasional di wilayah Asia Tenggara. Berkaitan dengan hal tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peluang Pemerintah Daerah Sulawesi Barat dalam memanfaatkan desentralisasi sebagai instrumen diplomasi dalam konteks kerja sama internasional di kawasan Asia Tenggara?

2. Apa saja tantangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Barat dalam menjalin kerja sama internasional di kawasan Asia Tenggara?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang serta tantangan Pemerintah Daerah Sulawesi Barat dalam memanfaatkan desentralisasi sebagai instrumen diplomasi dalam konteks kerja sama internasional di kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang paradiplomasi dan desentralisasi di Indonesia, khususnya pada konteks wilayah luar Jawa yang kurang banyak diteliti serta hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemangku kepentingan daerah Sulawesi Barat untuk merancang program kerja sama luar negeri yang lebih strategis dan berdampak.

Penelitian yang berkaitan dengan Desentralisasi sebagai instrumen diplomasi sudah beberapa kali dilakukan misalnya oleh Hafiq dkk. Penelitian ini mengkaji beragam hambatan yang dihadapi dalam implementasi praktik paradiplomasi oleh Pemerintah Kota Surabaya pada periode 2020–2024. Paradiplomasi yang mengacu pada partisipasi aktif entitas pemerintahan subnasional dalam aktivitas hubungan internasional telah berfungsi sebagai instrumen strategis bagi Kota Surabaya dalam memperluas jejaring kerja sama global sekaligus memperkuat posisi daya saingnya di tingkat internasional. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Faishal & Yulianti yang menggambarkan dinamika proses serta bentuk pelaksanaan paradiplomasi yang terjalin antara Provinsi Jawa Barat dan Region Souss-Massa (Maroko), yang telah menjalin hubungan kemitraan sister province sejak tahun 2017 hingga saat ini (Faishal & Yulianti, 2024).

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Fitriisia Munir dalam disertasinya mengevaluasi dan memperjelas peran aktor sub negara dalam mengembangkan paradiplomasi wilayah perbatasan di Pulau Batam dan Bintan, Kepulauan Riau dalam konsep mikro regionalisme. Tujuan paradiplomasi di wilayah perbatasan ini adalah untuk menjelaskan jenis-jenis keterlibatan aktor sub negara yang paling mendasar melakukan intervensi dalam aktifitas internasional di wilayah perbatasan (Munir, 2021). Perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada lokus penelitian yaitu di Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya penelitian ini juga akan berfokus pada peluang dan hambatan daerah dalam melakukan kerjasama internasional dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

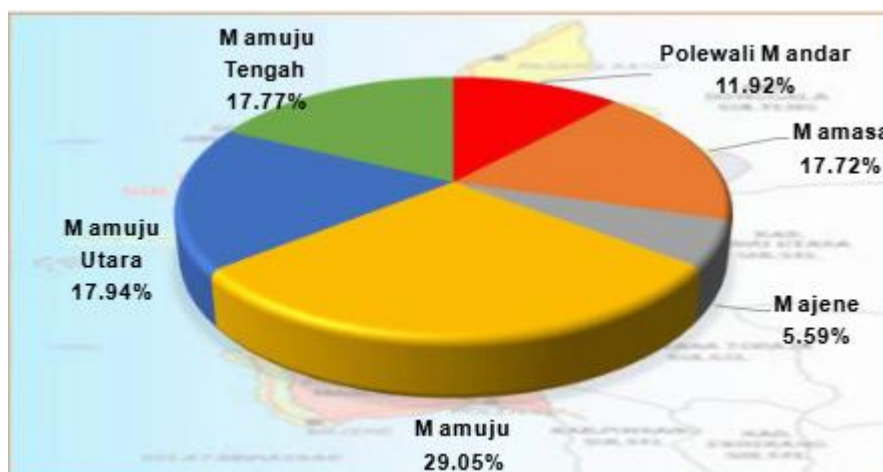
## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis bagaimana peluang serta tantangan Pemerintah Daerah Sulawesi Barat dalam memanfaatkan desentralisasi sebagai instrumen diplomasi dalam konteks kerja sama internasional di kawasan Asia Tenggara. Dalam studi ini, data yang digunakan bersumber dari data sekunder, yang diperoleh melalui studi literatur, artikel ilmiah, jurnal akademik, pemberitaan, laporan, serta situs resmi yang relevan dengan topik penelitian. Penyajian data dilakukan melalui proses pengorganisasian dan pereduksian data, yang bertujuan untuk memfasilitasi penarikan kesimpulan serta mendukung pengambilan keputusan (Silalahi, 2006). Teknik validasi data meliputi triangulasi sumber, data diperoleh dari berbagai sumber, seperti dokumen resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (peraturan daerah, rencana strategis, laporan kerja sama luar negeri). Perbandingan antar sumber digunakan untuk melihat konsistensi informasi, misalnya kesesuaian antara pernyataan pejabat pemerintah dengan data lapangan terkait peluang kerja sama dengan Filipina, Singapura, dan Thailand. Analisis dilakukan berdasarkan interpretasi terhadap data dan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Analisis ini mencakup tentang dua hal utama yaitu peluang Sulawesi Barat dalam kerjasama internasional di kawasan Asia Tenggara dan tantangan yang dihadapi dalam kerjasama tersebut.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Sektor- Sektor Potensial Sulawesi Barat

Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan beragam, mencakup sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, hingga perkebunan. Dalam sektor pertanian, komoditas unggulan didominasi oleh sub sektor tanaman perkebunan, khususnya kelapa, kakao, dan kopi. Pada sub sektor kehutanan, rotan menjadi komoditas utama yang menonjol. Sementara itu, dalam sub sektor perikanan, potensi terbesar terletak pada perikanan tangkap. Selain itu, komoditas penunjang di sektor pertanian meliputi kelapa sawit dan kopi dalam sub sektor perkebunan, serta kegiatan budidaya laut, tambak, dan kolam dalam sub sektor perikanan (Fallahnda, 2024).



Gambar Persentase Luas Wilayah Setiap Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.

Sumber : Nurlina Harli, 2025

Dari keseluruhan luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat, sekitar 15,88% atau setara dengan kurang lebih 269.443 hektar merupakan area yang dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Kakao merupakan komoditas utama yang menempati posisi strategis dalam sektor perkebunan di Provinsi Sulawesi Barat, dengan tingkat dominasi yang tinggi baik dari segi luas areal tanam maupun kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Komoditas ini berperan signifikan dalam mendukung pendapatan masyarakat, terutama melalui pola budidaya yang didominasi oleh perkebunan rakyat secara swadaya. Selain menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar petani, kakao juga berpotensi mendorong peningkatan ekspor daerah dan pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas lokal. Keunggulan ini menempatkan Sulawesi Barat sebagai wilayah yang potensial untuk dikembangkan dalam konteks kerjasama internasional, khususnya di sektor pertanian dan perdagangan komoditas, melalui pemanfaatan instrumen desentralisasi dan diplomasi daerah.

| Kabupaten<br>Regency  | Kakao<br>Cocoa |               |
|-----------------------|----------------|---------------|
|                       | 2022           | 2023*         |
| (1)                   | (10)           | (11)          |
| Majene                | 9.396          | 6.282         |
| Polewali Mandar       | 41.625         | 41.625        |
| Mamasa                | 9.236          | 9.236         |
| Mamuju                | 8.333          | 21.619        |
| Pasangkayu            | 7.933          | 7.833         |
| Mamuju Tengah         | 11.611         | 10.330        |
| <b>Sulawesi Barat</b> | <b>88.134</b>  | <b>96.925</b> |

### Luas Tanaman Perkebunan Kakao yang Menghasilkan Menurut Kabupaten dan di Provinsi Sulawesi Barat (hektar), 2022 dan 2023

Sumber : Sulbar dalam Angka BPS Sulbar 2025

Pada tahun 2025, kakao yang merupakan komoditas unggulan sektor perkebunan di Provinsi Sulawesi Barat telah berhasil menembus pasar internasional. Hal ini dibuktikan melalui kegiatan pelepasan ekspor biji kakao fermentasi oleh PT Untuk Indonesia Hijau ke Yokohama, Jepang, yang dilaksanakan secara simbolis pada Jumat, 18 Juli 2025, di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Seremoni pelepasan ekspor tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat dan turut dihadiri oleh Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat.

Kegiatan ekspor ini mencerminkan komitmen nyata Pemerintah Daerah Sulawesi Barat dalam mendukung penguatan ekonomi nasional melalui optimalisasi potensi komoditas lokal. Gubernur Sulawesi Barat menegaskan bahwa ekspor kakao asal Sulawesi Barat tidak hanya terbatas pada pasar domestik, tetapi juga telah mencapai pasar Eropa, Amerika Serikat, dan saat ini Jepang, sebagai bukti kontribusi nyata daerah terhadap perekonomian nasional. Senada dengan hal tersebut, Menteri Transmigrasi RI menyampaikan bahwa kemampuan produk-produk daerah seperti kakao Sulawesi Barat untuk bersaing di pasar global menunjukkan potensi besar daerah dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Beliau juga menekankan pentingnya dukungan terhadap pengembangan produk lokal agar dapat berdaya saing tinggi di tingkat internasional serta berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Dinas Perkebunan Sulawesi Barat, 2025).

Sektor lainnya adalah perikanan dan kelautan. Provinsi Sulawesi Barat memiliki kawasan laut dan pesisir yang luas, terhampar di sepanjang Selat Makassar yang berfungsi sebagai jalur pelayaran internasional. Selain itu, letak geografis Sulawesi Barat tergolong strategis karena berada di posisi sentral yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur. Perikanan tangkap merupakan salah satu sektor unggulan yang menjadi tumpuan mata pencaharian masyarakat pesisir di Provinsi Sulawesi Barat. Wilayah perairannya yang kaya akan sumber daya ikan, seperti tuna, cakalang, kerapu, serta berbagai jenis ikan pelagis lainnya, menunjukkan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Namun demikian, pemanfaatan potensi tersebut masih belum optimal akibat sejumlah kendala yang dihadapi oleh nelayan lokal, termasuk keterbatasan dalam ketersediaan alat tangkap, akses terhadap teknologi modern, serta kurangnya infrastruktur pendukung perikanan.

Selain sektor perikanan tangkap, subsektor budidaya laut di Sulawesi Barat juga memiliki potensi ekonomi yang cukup signifikan. Kondisi perairannya yang mendukung menjadikan wilayah ini sangat potensial untuk pengembangan komoditas budidaya seperti rumput laut, ikan

kerapu, lobster, dan kerang mutiara. Secara khusus, rumput laut telah menempatkan Sulawesi Barat sebagai salah satu sentra produksi utama di tingkat nasional. Dalam konteks pengembangan ke depan, peningkatan mutu hasil budidaya perlu menjadi prioritas utama, mengingat tingginya permintaan pasar global terhadap produk perikanan dengan standar kualitas tinggi yang terus mengalami pertumbuhan (Syahrinullah, 2024).

Sektor lainnya yang tidak kalah penting adalah pariwisata. Potensi pariwisata di Sulawesi Barat juga sangat besar. Sektor pariwisata merupakan salah satu sumber penting pendapatan asli daerah (PAD) yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Selain berfungsi sebagai penggerak utama perekonomian lokal, pariwisata juga memiliki peran strategis dalam menekan angka pengangguran, khususnya bagi masyarakat yang bermukim di sekitar destinasi wisata. Setiap kabupaten di Sulawesi Barat memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi pariwisata yang melimpah, dengan karakteristik yang beragam, estetis, unik, dan menarik untuk dikembangkan. Potensi tersebut meliputi lanskap alam yang memukau, keunikan budaya lokal yang eksotis, hingga ragam wisata minat khusus dan alternatif yang tersebar di kawasan pesisir dan pegunungan, yang menuntut keterampilan khusus dalam penjelajahannya.

Sulawesi Barat juga memiliki daya tarik pariwisata bahari yang kuat, didukung oleh garis pantai yang panjang. Sebagian besar penduduknya, yang tersebar di lima kabupaten pesisir, memiliki sejarah sebagai masyarakat maritim. Warisan budaya ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk teknologi transportasi tradisional mereka. Salah satu warisan maritim yang paling ikonik adalah Perahu Sandeq, sebuah perahu layar tradisional yang menjadi simbol kejayaan pelaut suku Mandar. Pengakuan atas nilai budaya dan potensi pariwisata Perahu Sandeq terlihat dari penetapan acara Sandeq Race oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Acara ini bahkan masuk dalam daftar 100 Top National Events dalam Kalender Event nasional dari tahun 2017 hingga 2020. (Dinas Pariwisata Sulawesi Barat, 2022).

### **Kerjasama Potensial Sulawesi Barat di Kawasan Asia Tenggara**

Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi signifikan dalam sektor perkebunan, didukung oleh kondisi agroklimat yang kondusif untuk budidaya komoditas unggulan tropis seperti kakao, kopi, kelapa. Potensi ini di dukung oleh karakteristik sosio-ekonomi masyarakat yang agraris, di mana perkebunan menjadi pilar utama perekonomian lokal. Guna mengoptimalkan potensi tersebut secara berkelanjutan dan berorientasi pada pasar ekspor, diperlukan penguatan kerja sama internasional. Salah satu pendekatan strategis yang dapat ditempuh adalah melalui diplomasi daerah (paradiplomasi), seperti implementasi skema *Sister Province* atau *Sister City* dengan mitra di kawasan Asia Tenggara. Mekanisme ini dapat menjadi katalisator untuk transfer pengetahuan, pengembangan teknologi, dan peningkatan akses pasar, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk perkebunan Sulawesi Barat di pasar global.

Terdapat beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang berpotensi untuk dijadikan mitra kerjasama bagi Sulawesi Barat dalam skema *sister city* atau *sister province*. Negara seperti Filipina yang juga dikenal sebagai produsen kelapa dapat menjadi mitra strategis. Kemitraan ini berpotensi membuka peluang untuk pertukaran pengetahuan mengenai diversifikasi produk turunan kelapa dan strategi akses pasar internasional. Selanjutnya Sulawesi Barat dapat mengambil kesempatan dalam hubungan kerjasama yang telah terbangun sebelumnya antara pemerintah Indonesia dengan Filipina. Seperti diketahui kerjasama kedua negara erat berkaitan dengan sektor pertanian dan perkebunan. Pada tahun 2021, Indonesia menjadi mitra dagang terbesar ketiga bagi Filipina. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI, total nilai perdagangan kedua negara mencapai 9,8 miliar dolar AS. Dari jumlah tersebut, ekspor Indonesia ke Filipina menyumbang 8,6 miliar dolar AS, sementara impor dari Filipina sebesar 1,2 miliar dolar AS (Prasetyo, 2022).

Peluang kerjasama internasional lainnya yaitu dengan negara Singapura. Indonesia dan Singapura sedang mengeksplorasi kolaborasi strategis di bidang ketahanan pangan dan inovasi teknologi pertanian. Kedua negara tengah membahas mekanisme pertukaran pengetahuan serta penerapan teknologi yang dapat memberikan manfaat timbal balik dalam sektor pertanian dan pangan. Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, menyampaikan bahwa meskipun Singapura memiliki keterbatasan dalam ketersediaan lahan pertanian, negara tersebut memiliki keunggulan dalam pengembangan teknologi pangan, khususnya dalam praktik pertanian urban dan peningkatan efisiensi serta produktivitas sejumlah komoditas pertanian.

Selain aspek transfer pengetahuan, kerja sama yang sedang dijajaki juga mencakup potensi dalam perdagangan pangan, termasuk impor dan ekspor. Kedua belah pihak berupaya membentuk kesepakatan bersama terkait standar mutu pangan sebagai dasar untuk memperkuat hubungan perdagangan di sektor tersebut (Sharon, 2024). Melihat peluang kerja sama yang sedang dikembangkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi yang signifikan untuk turut berperan, terutama karena daerah ini memiliki keunggulan di bidang pertanian dan perkebunan. Di hampir seluruh kabupaten di Sulawesi Barat, tersedia lahan pertanian yang luas disertai dengan kemampuan produksi berbagai komoditas unggulan seperti kakao, kopi, kelapa, dan jagung.

Kondisi geografis dan sumber daya alam yang mendukung menjadikan wilayah ini sangat ideal untuk pengembangan pertanian dalam skala besar maupun berbasis keberlanjutan. Oleh karena itu, Sulawesi Barat berpeluang menjadi mitra strategis dalam kerja sama ini, khususnya dalam pengembangan hilirisasi produk pertanian, peningkatan hasil panen melalui pemanfaatan teknologi, serta pembukaan akses ekspor yang lebih luas. Keterlibatan daerah ini dalam kerja sama internasional juga diyakini dapat mendorong peningkatan kompetensi petani lokal, melalui transfer teknologi dan penerapan standar mutu internasional, sehingga hasil pertanian Sulawesi Barat dapat lebih kompetitif di pasar global.

Negara lainnya di kawasan Asia Tenggara yang dapat menjadi mitra kerjasama Sulawesi Barat yaitu Thailand. Thailand dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat konsumsi kopi yang cukup tinggi, karena budaya minum kopi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Dalam rangka mendukung implementasi program strategis Kementerian Pertanian, khususnya *Gerakan Tiga Kali Ekspor (GRATIEKS)*, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan turut berpartisipasi dalam ajang pameran internasional bertajuk Thailand Coffee, Tea & Drink ke-14. Pameran tersebut berlangsung pada tanggal 27 Februari hingga 1 Maret 2020, di Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), sebuah lokasi pameran berskala internasional yang prestisius di Thailand.

Dalam pameran ini, kopi asal Mamasa baik varietas arabika maupun robusta menarik perhatian pembeli dari sedikitnya 11 negara, antara lain Thailand, Korea Selatan, Selandia Baru, Kamboja, Swiss, Jerman, Vietnam, Amerika Serikat, Singapura, Tiongkok, dan Myanmar. Direktur Jenderal Perkebunan, Kasdi Subagyo, mengungkapkan bahwa sekitar 70 persen calon pembeli potensial berasal dari Thailand, dengan minat yang tinggi terhadap kopi robusta La Mamasa, yang banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan kedai kopi atau kafe yang semakin menjamur di kalangan generasi muda Thailand.

Berdasarkan hasil *primary research* yang diperoleh melalui sesi *business matching* antara pelaku usaha dan para calon pembeli internasional, teridentifikasi bahwa nilai potensi kesepakatan dagang untuk kopi La Mamasa mencapai Rp819,22 miliar. Angka ini terdiri dari potensi penjualan kopi arabika senilai Rp390,1 miliar dan kopi robusta sebesar Rp429,1 miliar (Ditjenbun Kementan RI 2020). Menariknya kopi La Mamasa itu sendiri berasal dari Provinsi Sulawesi Barat tepatnya Kabupaten Mamasa.

Kondisi ini membuka peluang besar bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk lebih proaktif dalam mendorong komoditas kopi sebagai salah satu andalan ekspor daerah. Mamasa yang merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Barat, memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan perkebunan kopi. Daerah ini dikenal dengan luasnya areal tanam kopi,

mutu biji kopi yang mampu bersaing di pasar, serta kondisi agroklimat yang sangat mendukung pertumbuhan varietas arabika maupun robusta. Keberhasilan kopi La Mamasa dalam menarik perhatian pasar internasional dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai landasan dalam menyusun kebijakan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing komoditas kopi lokal, baik dari sisi kualitas produk, volume produksi, maupun efektivitas distribusi dan pemasaran di tingkat global.

Sulawesi Barat juga memiliki potensi yang kuat untuk dikembangkan sebagai salah satu pusat ekspor kopi di Indonesia, asalkan terdapat kerja sama yang erat antara pemerintah provinsi, pelaku industri, kelompok tani, serta mitra dagang dari luar negeri. Upaya yang dapat dilakukan antara lain mencakup penyediaan akses terhadap sertifikasi standar mutu, pelatihan teknis untuk praktik pertanian berkelanjutan, penguatan kelembagaan koperasi petani, serta keterlibatan aktif dalam promosi produk pada berbagai forum perdagangan internasional. Melalui pendekatan yang sistematis dan terintegrasi, peran daerah dalam mendorong ekspor kopi tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan petani lokal, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan nasional dalam program Gerakan Tiga Kali Ekspor (GRATIEKS).

Berkaitan dengan upaya mendorong penguatan sektor-sektor unggulan daerah, potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Barat perlu dioptimalkan oleh pemerintah daerah melalui pembukaan akses kerja sama internasional, khususnya dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dengan garis pantai yang luas, perairan yang kaya akan sumber daya, serta keanekaragaman hayati laut yang tinggi, Sulawesi Barat memiliki posisi strategis dalam pengembangan subsektor perikanan tangkap maupun budidaya. Kombinasi antara kondisi geografis yang menguntungkan dan kekayaan sumber daya alam menjadikan sektor ini sebagai salah satu pilar utama perekonomian daerah, yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam konteks perdagangan lintas negara.

Paradiplomasi pada hakikatnya dipahami sebagai partisipasi pemerintah daerah dalam aktivitas hubungan internasional yang berlangsung di luar mekanisme diplomasi resmi negara. Konsep ini memberikan peluang bagi aktor subnasional untuk menjalin interaksi transnasional, memperluas jejaring ekonomi lintas batas, sekaligus menyuarakan kepentingan lokal dalam konteks global. Studi mengenai Sulawesi Barat menunjukkan bahwa desentralisasi membuka ruang strategis bagi daerah untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya unggulannya melalui praktik diplomasi daerah. Sektor perkebunan seperti kopi, kakao, dan kelapa serta potensi kelautan dan perikanan dipandang sebagai aset penting yang dapat diformulasikan sebagai instrumen diplomasi ekonomi.

Melalui skema kerja sama Sister Province atau Sister City, pemerintah daerah memiliki peluang untuk menembus pasar internasional melalui jalur alternatif, membangun kemitraan dengan negara-negara tetangga (Filipina, Singapura, dan Thailand) yang memiliki keunggulan saling melengkapi, serta mendorong alih teknologi dan pertukaran pengetahuan. Contohnya, diversifikasi produk turunan kelapa dari Filipina, teknologi pertanian urban dari Singapura, dan inovasi pengolahan kopi dari Thailand. Dalam kerangka ini, paradiplomasi bukan hanya sekadar memperluas jaringan perdagangan antarnegara, melainkan juga berfungsi sebagai pendorong peningkatan mutu produksi serta penguatan daya saing komoditas lokal di pasar global.

Seiring dengan meningkatnya keterbukaan pasar di kawasan ASEAN, potensi ekspor komoditas perikanan Indonesia ke negara-negara tetangga semakin menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat bahwa Indonesia mencetak surplus dalam neraca perdagangan sektor perikanan selama periode Januari hingga September 2024. Selama periode tersebut, ekspor produk perikanan ke Tiongkok tumbuh sebesar 7,8 persen, sementara pengiriman ke kawasan ASEAN mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 18,7 persen. Kawasan Asia Tenggara dan Uni Eropa tercatat sebagai pasar strategis bagi ekspor perikanan Indonesia, dengan kontribusi masing-masing mencapai USD 569,75 juta (setara 13,5 persen) dan USD 309,41 juta (sekitar



7,3 persen) dari total nilai ekspor nasional di sektor ini (Kompas.com, 2024). Fakta ini menegaskan bahwa produk-produk perikanan dari Indonesia termasuk dari wilayah seperti Sulawesi Barat memiliki daya saing yang kuat dan mampu memenuhi kebutuhan pasar regional.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memiliki peluang strategis untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara dalam bidang ekspor hasil perikanan, baik melalui pembentukan kesepakatan dagang formal, kolaborasi antara pelaku usaha, maupun melalui partisipasi aktif dalam mekanisme kerja sama ekonomi regional seperti ASEAN. Selain memperluas akses pasar bagi komoditas lokal, kolaborasi ini juga dapat mencakup aspek-alih teknologi, peningkatan kualitas proses pengolahan dan pengemasan produk, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia lokal khususnya nelayan dan pelaku usaha kecil melalui pelatihan yang disesuaikan dengan standar dan kebutuhan pasar internasional.

### **Tantangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Diplomasi Daerah**

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dihadapkan pada berbagai tantangan mendasar yang harus segera diatasi dalam upaya untuk memaksimalkan kerja sama internasional, khususnya dengan negara-negara Asia Tenggara. Hal ini penting agar potensi besar di berbagai sektor dapat dimanfaatkan secara maksimal. Meskipun wilayah ini memiliki sumber daya laut serta perkebunan yang melimpah dan posisi geografis yang menguntungkan, masih terdapat berbagai kendala teknis dan struktural yang menghambat pengembangan sektor tersebut sebagai motor ekspor dan alat diplomasi ekonomi daerah. Tantangan lainnya dapat di tinjau dari beberapa aspek diantaranya :

#### **Keterbatasan Kapasitas SDM dan Kelembagaan**

Sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu sektor unggulan Provinsi Sulawesi Barat yang dapat dimanfaatkan dalam kerangka kerjasama internasional. Untuk dapat menembus pasar negara-negara Asia Tenggara produk perikanan perlu memenuhi berbagai persyaratan mutu seperti batas kandungan logam berat serta harus dilengkapi dengan sertifikasi internasional seperti HACCP Seafood disertai dokumen pendukung yang lengkap. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan kelembagaan di Sulawesi Barat, khususnya pada kelompok pembudidaya, nelayan, dan unit PPI, sering menjadi kendala dalam memenuhi persyaratan tersebut. Salah satu contohnya adalah sistem pendinginan dan penyimpanan yang belum memadai, yang kerap menyebabkan penurunan kualitas ikan sebelum mencapai pasar ekspor.

Fasilitas penyimpanan ikan seperti *cold storage* dan pabrik es di Sulawesi Barat sangat terbatas dan sering tidak beroperasi secara optimal dalam mendukung sistem logistik penyimpanan bersama. Sistem transportasi serta rantai pasok juga belum tersusun dengan baik. Ketidakstabilan harga komoditas ikan menjadi tantangan, yang sebagian besar disebabkan oleh infrastruktur pasca panen yang kurang memadai. Selain itu, sekitar 95% kapal nelayan di daerah ini berukuran kecil (di bawah 5 GT) dan banyak aktivitas penangkapan ikan hanya berlangsung selama satu hari tanpa bermalam di laut. Kondisi ini mengakibatkan hasil tangkapan yang relatif sedikit dan keterbatasan dalam menjangkau perairan yang lebih jauh.

Kurangnya pengetahuan tentang dinamika pasar internasional serta rendahnya kepatuhan terhadap standar kualitas global membuat produk daerah kehilangan daya saing. Karena itu, penguatan kapasitas melalui pelatihan dan sertifikasi mutu menjadi langkah yang sangat penting. Selain itu, ketiadaan infrastruktur ekspor yang memadai menyebabkan komoditas unggulan daerah tidak mampu bersaing secara berkelanjutan di pasar dunia. Kondisi ini menegaskan bahwa pembangunan sarana pendukung ekspor merupakan strategi kunci untuk mengatasi persoalan dalam rantai pasok.

## **Minimnya Jaringan Internasional dan Promosi Daerah**

Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, terutama di bidang perkebunan serta perikanan dan kelautan. Kedua sektor ini menjadi penopang utama perekonomian daerah dengan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan penyerapan tenaga kerja di kabupaten-kabupaten seperti Polewali Mandar, Mamasa, dan Majene. Meski demikian, potensi yang besar tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal dalam kerangka kerja sama internasional, khususnya di wilayah Asia Tenggara, akibat jaringan internasional yang masih lemah dan kurangnya promosi daerah yang dilakukan secara terencana dan sistematis.

Salah satu kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah Sulawesi Barat adalah keterbatasan dalam menjalin hubungan formal dengan mitra internasional, baik melalui kerja sama antar pemerintah (G2G), pelaku bisnis (B2B), maupun melalui forum multilateral seperti ASEAN. Saat ini, sebagian besar aktivitas promosi luar negeri dan kemitraan perdagangan masih dikelola oleh pemerintah pusat atau lembaga nasional. Pemerintah daerah sendiri belum memiliki unit atau divisi khusus yang secara aktif mengembangkan jaringan internasional khususnya di sektor perkebunan dan kelautan.

Sebagai contoh, meskipun kopi La Mamasa sudah diminati di lebih dari 10 negara, termasuk di salah satu negara Asia Tenggara yaitu Thailand, sebagian besar akses pasar tersebut dikembangkan oleh eksportir swasta atau melalui pameran yang dilakukan secara tidak rutin. Pemerintah daerah belum memiliki wadah diplomasi perdagangan atau jaringan distribusi internasional yang dapat mendukung keberlanjutan ekspor langsung dari wilayah tersebut. Promosi produk masih banyak dilakukan oleh pemerintah pusat melalui kementerian terkait, seperti yang pernah berlangsung di Thailand. Kementerian Pertanian, melalui Direktorat Jenderal Perkebunan, berpartisipasi dalam pameran internasional Thailand Coffee, Tea & Drink ke-14 yang diadakan pada 27 Februari hingga 1 Maret 2020 di lokasi strategis dan ternama di Thailand, di mana kopi La Mamasa dari Provinsi Sulawesi Barat turut dipamerkan. Begitu pula di sektor kelautan, walaupun beberapa pelaku usaha seperti CV Sakura Prima sudah sukses mengeksport ikan terbang beku ke Jepang, pencapaian ini belum banyak diikuti oleh perusahaan lain. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jaringan dengan pembeli internasional dan belum terintegrasinya upaya tersebut ke dalam peta jalan ekspor daerah.

Terbatasnya jaringan diplomasi lintas negara, baik di kawasan ASEAN maupun pada forum internasional lainnya, membuat peran dan legitimasi daerah dalam memperjuangkan kepentingan perdagangan menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, penguatan strategi paradiplomasi melalui perluasan jejaring global menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya tawar di tengah persaingan internasional. Di sisi lain, adanya fragmentasi peran antar aktor dalam ekosistem perdagangan daerah juga menjadi hambatan serius. Minimnya koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas petani dan nelayan, serta lemahnya dukungan pemerintah pusat berdampak pada lambatnya perkembangan ekspor daerah. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan kemitraan kolaboratif yang menyeluruh dan berkelanjutan agar ekosistem perdagangan mampu beradaptasi dengan dinamika global.

## **4. KESIMPULAN**

Penelitian ini menegaskan bahwa Sulawesi Barat memiliki potensi strategis di sektor perkebunan kopi, kakao, dan kelapa serta kelautan dan perikanan, yang ditopang oleh basis sosial ekonomi masyarakat agraris serta kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan melalui mekanisme paradiplomasi, misalnya lewat skema *Sister Province* atau *Sister City* dengan negara-negara Asia Tenggara yang memiliki kepentingan dan keunggulan komplementer. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa Filipina, Singapura, dan Thailand merupakan mitra kerjasama internasional potensial untuk daerah Sulawesi Barat.

Filipina dapat menjadi rujukan diversifikasi produk berbasis kelapa, Singapura menawarkan keunggulan dalam teknologi pertanian urban dan ketahanan pangan, sedangkan Thailand membuka peluang dalam pengolahan kopi sekaligus pasar internasional. Kolaborasi dengan negara-negara tersebut berpotensi memperluas akses ekspor, mendorong alih teknologi, serta meningkatkan daya saing produk unggulan Sulawesi Barat di pasar global. Namun, tantangan mendasar meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kelemahan kelembagaan, minimnya infrastruktur ekspor, dan jaringan promosi internasional yang belum optimal. Faktor-faktor ini menurunkan kemampuan daerah dalam memanfaatkan peluang kerja sama secara maksimal meskipun potensi komoditas dan permintaan pasar cukup besar.

## 5. REFERENSI

- Asean.Org. (2025). *ASEAN Economic Community*. <https://asean.org/our-communities/economic-community/>
- Faishal, M. A., & Yulianti, D. (2024). Paradiplomasi Jawa Barat Melalui Kerja Sama Sister Province antara Jawa Barat dan SoussMassa. *Jurnal Hubungan Internasional*, 17(1).
- Fallahnda, B. (2024). *Potensi Sumber Daya Alam Sulawesi*. <https://tirto.id/potensi-sumber-daya-alam-sulawesi-gorontalo-gt3a>
- Kuznetsov, A. (2014). *Theory and practice of paradiplomacy: Subnational governments in international affairs*. Routledge.
- Lathifah, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2024). Transformasi Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Pemerintahan Daerah Di Era Globalisasi. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 577–584.
- Munir, F. (2021). *Paradiplomasi Di Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Penguatan Mikro Regionalisme Di Batam-Bintan Kepulauan Riau Indonesia (2010-2017)*. Universitas Padjadjaran.
- Prasetyo, A. (2022). *Indonesia-Filipina Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Perdagangan*. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/520144/indonesia-filipina-sepakat-tingkatkan-kerja-sama-perdagangan>
- Silalahi, U. (2006). *Metode penelitian sosial*. Unpar press.
- Syahrinullah. (2024). *Meneropong Potensi Ekonomi Perairan Sulawesi Barat, Butuh Strategi Komprehensif Untuk Dikembangkan*. <https://sulbar.tribunnews.com>